



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

**BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN
DIY
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Perbenihan Kehutanan DIY dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sekaligus solusi atas isu-isu penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap Laporan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

KEPALA

BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN DIY



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tri Basuki Sundoro'.

TRI BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP 196607131992031006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya...

lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur PD lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh UndangUndang Pelayanan Publik;
 - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024

Waktu : Pukul 9.00 – 13.15 WIB

Tempat : Aula Adipura lantai 2 Balai Perbenihan Kehutanan DIY

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Balai Perbenihan Kehutanan DIY dengan telah dibentuk Tim Internal dengan surat keputusan No. 000.8.3.4/1 tanggal 2 Februari 2024

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan,
- c. Stakeholders pelayanan publik;
- d. Akademisi/pakar;
- e. NGO/LSM/*Civil Society Organization*;
- g. Dunia usaha/swasta;

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Panitia yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Balai Perbenihan Kehutanan DIY, dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan pemaparan materi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Perbenihan dan Kepala Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan Balai Perbenihan Kehutanan D I Y . Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ir. Tri Basuki Sundoro, M.Si.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP dilakukan dengan **Tatap Muka (Rapat Koordinasi)** berupa pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan (Balai Perbenihan Kehutanan DIY) dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan (Balai Perbenihan Kehutanan DIY) berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari upaya penyederhaan proses mekanisme dan prosedur pelayanan di dalam Standar Pelayanan pada Balai Perbenihan Kehutanan DIY tahun 2024.

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat terkait revisi standar pelayanan.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dalam bentuk komitmen dan rencana aksi perbaikan layanan antara penyelenggara layanan dengan perwakilan pihak-pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Kepala Balai Perbenihan Kehutanan.

Adapun Susunan Acara Forum Konsultasi Publik Balai Perbenihan Kehutanan DIY Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Narasumber	Penanggungjawab
1.	09.00 – 09.15	Registrasi peserta		Panitia
2.	09.15 – 09.30	Pembukaan Acara	Kepala BBH	Panitia
3.	09.15 – 09.30	Sambutan	Kepala DLHK	Moderator
4.	09.30 – 10.00	Paparan I Peningkatan Standar Pelayanan Pengaduan/Saran/Masukan dengan sistem online	Ka Sub Bag Tata Usaha BBH	Moderator
5.	10.00 – 10.30	Paparan II Peningkatan Standar Pelayanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan dengan sistem online	Ka Seksi Pengembangan Perbenihan BBH	Moderator
6.	10.30 – 11.00	Paparan III Peningkatan Standar Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Kehutanan dengan sistem online	Ka Seksi Sertifikasi Benih Tan aman Kehutanan BBH	Moderator
7.	11.00 – 11.30	Paparan IV Pengenalan Mekanisme dan Prosedur Layanan berbasis online	Staf BBH	Moderator
8.	11.30 – 12.30	Diskusi		Moderator
9.	12.30 – 13.00	Penyusunan dan Penandatanganan Berita Acara		Panitia
10	13.00 – 13.15	Penutupan	Kepala BBH	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka pembahasan revisi Dokumen Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan DIY. Dimana beberapa komponen service delivery yang ada didalam Standar Pelayanan Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian kembali khususnya pada sistem, mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan saran dan masukan. Kedua komponen tersebut sangat penting untuk diperbaiki menyesuaikan kebutuhan pengguna layanan .

Penyelenggaraan FKP juga untuk menampung masukan dari masyarakat dalam rangka perbaikan layanan yang ada di Balai Perbenihan Kehutanan DIY.

2. Analisis

Adanya masukan dari masyarakat pada Survey Kepuasan Masyarakat terkait penyederhaan proses bantuan bibit tanaman kehutanan di Balai Perbenihan, Kehutanan maka sebelum Forum Konsultasi Publik dilaksanakan, Balai Perbenihan Kehutanan DIY pada tanggal 5 Januari 2024 telah melaksanakan identifikasi, review dan evaluasi terhadap beberapa Komponen Service Delivery pada Standar Pelayanan untuk dilakukan revisi. Hasil dari evaluasi dan identifikasi adalah perlunya revisi komponen service delivery yang ada didalam Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan Tahun 2022.

Dalam Forum Konsultasi Publik ini pengguna layanan memberikan masukan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemakmuran pengusaha bibit harus ada solusi melalui sinergitas dengan OPD lain.
2. Bantuan Bibit diharapkan bisa diakses dari perorangan dengan menunjukkan KTP

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

**PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN DIY :**

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN (Identifikasi dan Analisis Masalah)	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan	Perlu penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam rangka mempermudah pengguna layanan untuk mengakses Layanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan	Telah Merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur jenis pelayanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya
2	Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan	Akses Pelayanan tidak hanya bagi kelompok tapi juga perorangan	Akan mengusulkan anggaran pembuatan bibit tanaman budaya langka dan tanaman khas keistimewaan melalui dana keistimewaan pada tahun 2025
3	Verifikasi Teknis terkait Penerbitan Ijin Pengadaan/Pengedaran Benih dan/atau Bibit Terdaftar Tanaman Kehutanan melalui OSS RBA	Untuk meningkatkan kemakmuran pengusaha bibit harus ada solusi melalui sinergitas dengan OPD lain	1. Berkoordinasi dan bersinergi dengan lintas sektoral Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan (DPTH pusat) terkait dengan pengadaan bibit agar dapat menghidupi pengada pengedar di daerah agar melibatkan pengada pengedar swasta setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha di bidang kehutanan 2. Peningkatan sinergitas antara Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), BBH dan pengada pengedar

			terkait dengan regulasi perundangan di bidang perbenihan tanaman hutan
4	Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih	Perlu penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam rangka mempermudah pengguna layanan untuk mengakses Layanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih	Telah Merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur jenis pelayanan Layanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya
5	Pengaduan	Perlu penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam rangka mempermudah pengguna layanan untuk mengakses Layanan Pengaduan	Telah Merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur jenis pelayanan Pengaduan dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya

Pasca Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum dan Laporan Tindak Lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Kehutanan pada 19 Februari 2024 dan bertempat di Aula Adipura lantai 2 Kantor Balai Perbenihan Kehutanan DIY dengan tema Review Standar Pelayanan merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan FKP Balai Perbenihan Kehutanan DIY Tahun 2024 dilaksanakan melalui Pertemuan Koordinasi yang melibatkan pengada/pengedar dan mahasiswa selaku pengguna layanan, LSM, DPMPSTP selaku stakeholder, Instiper DIY selaku akademisi/pakar, CV. Esa, CV. Karya Handayani, CV. Trisna Tani selaku Dunia Usaha dan Balai Perbenihan Kehutanan DIY selaku penyelenggara layanan.
2. Kegiatan FKP ini telah menyepakati beberapa hal yang harus ditindaklanjuti diantaranya merevisi Standar Pelayanan pada komponen sistem, mekanisme dan prosedur pada jenis Layanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan, Layanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih dan Layanan Pengaduan dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan mempublikasikannya melalui website, media sosial dan media publikasi lainnya.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Hasil Kesepakatan dan komitmen yang sudah dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik baiknya guna mendukung peningkatan pelayanan publik.
2. Bagi pengguna layanan agar dapat memanfaatkan sebaik baiknya pelayanan publik yang sudah dibuat oleh penyelenggara layanan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran II. Salinan Daftar Hadir

Lampiran III. Surat Undangan

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Lampiran VI. Matriks Pelaporan FKP

LAMPIRAN I

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN KEHUTANAAN
Balai Perbenihan Kehutanan
Jalan Argulobang No.19 Telepon/Fax (0274) 549077
Email : balaibenihutandiy@gmail.com

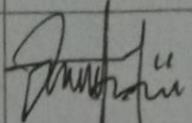
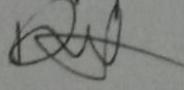
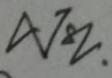
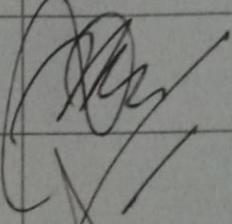
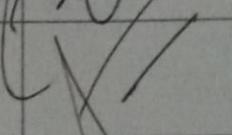
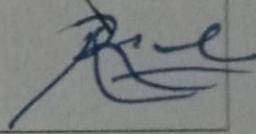
BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
BALAI PERBENIHAN KEHUTANAN DIY

Pada hari ini, Senin, 19 Februari 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Balai Perbenihan Kehutanan DIY. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

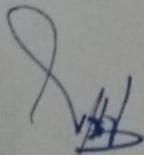
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Perlu penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam rangka mempermudah pengguna layanan untuk mengakses Layanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan,	Merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya	Revisi SK SP Bulan Februari 2024 Publikasi Bulan Maret 2024
2.	Perlu penyederhanaan prosedur dan mekanisme dalam rangka mempermudah pengguna layanan untuk mengakses Layanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih	Merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya	Revisi SK SP Bulan Februari 2024 Publikasi Bulan Maret 2024

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2024

No	NAMA	No. HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Darmiyati	08123707084	P	Pengguna Layanan	
2.	Deden R	08122769857	P	Stakeholder	
3.	SUTRISNO	08122950164	L	Dunia Usaha	
4.	Johanes Kurnawan	081215637168	L	LSM	
5.	RAJANA	08122753622	L	Akademisi/Pakar	
6.	TRI BASUKI S	08122767266	L	Penyelenggara Layanan	

KA SUB BAG TATA USAHA



KUNCARA, SP, M.Si
NIP. 196612291997031002



Tri BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP. 196607131992031006

LAMPIRAN II
SALINAN DAFTAR HADIR

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN KEHUTANAAN
ꦧꦭꦏꦶꦥꦺꦫꦧꦺꦤꦶꦁꦏꦺꦴꦛꦏꦤꦤꦶꦪ

Alamat Jl Argulobang No.19 Telepon/faksimile (0274) 549077
Email : balaibenihhutandiy@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 19 Februari 2024
Waktu : Jam 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Adipura lantai 2 Balai Perbenihan Kehutanan
Acara : Pertemuan Koordinasi dalam rangka FKP tentang Review Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan DIY Tahun 2024

NO	NAMA	L/P	GOL	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Rosario	L		CU ESA YOG	1
2	Antok	L		CV. KARYA H	2
3	SUTRISNO	L		CV. TRISNATAMA	3
4	RAWANA	L		INSTIPER	4
5	Johans Kusnan	L		CV. Buana Suman	5
6	Joko Suryono	L		Raja C. Marga	6
7	LIANA	AP		Amayo	7
8	Miptahul Yurita	P		Amayo	8
9	Hilaria Hilda	P		Amayo	9
10	Katharina F. w.	P		Mahasiswa	10
11	Darmiyati	P		Mahasiswa	11
12	Yakobus	L		BBH	12
13	Deden R	P		DPMPPTSP	13
14	Nuni	P		DPMPPTSP	14
15	Kusno	L		DLHK	15
16	Kuncoro	L		BBH	16
17	Tri Basuki S	L	IV	BBH	17
18	Jaka Sunjamb	L	IV	BBH	18
19	Munhidayal	P	III	BBH	19
20	Jalus	L	III	BBH	20
21	Wahyudi	L			21
22	Gilva R	P	III	BBH	22
23	Detri Ananta P.	L		BBH	23
24	Imam Juraidi	L		BBH	24
25	Yunanto Jari	L	III	BBH	25

19 Februari 2024
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI BENIH HUTAN
TRI BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP. 196007131992031006
DLHK

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN



B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN KEHUTANAAN

ꦧꦭꦏꦸꦩꦧꦺꦤꦶꦁꦏꦺꦲꦸꦠꦤꦤꦶꦪ

Alamat Jl. Argulobang 19 Yogyakarta 55225 Telepon/Faksimile (0274) 549077
Email : balaibenihutandiy@gmail.com

**NOTULENSI FORUM KONSULTASI PUBLIK TENTANG
REVIEW STANDAR PELAYANAN**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Februari 2024
Tempat : Aula Kalpataru Lantai 2 Balai Perbenihan Kehutanan
Waktu : 09.00 WIB – 13.15 WIB
Acara : Pertemuan Koordinasi dalam rangka FKP tentang Review Standar Pelayanan Tahun 2021 dan Penetapan Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan DIY Tahun 2024

Forum Konsultasi Publik tentang Review Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan pada tanggal 19 Februari 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun system penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta diterapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

1. Rapat dihadiri oleh Balai Perbenihan Kehutanan, Pengguna layanan (Mahasiswa), Dunia Usaha (CV.Karya Handayani, CV. Trisna Tani, CV Esa Yogya), Akademisi/pakar (INSTIPER), LSM serta stakeholder (DPMPTSP DIY).
2. Hasil Konsultasi Publik dengan tema Review Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan adalah sebagai berikut:
 - a. Standar Pelayanan Tahun 2024 disepakati dan ditetapkan substansinya dengan merevisi Standar Pelayanan pada Komponen Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan, Layanan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih dan Layanan Pengaduan dengan menambah pelayanan dengan sistem Online dan akan segera mempublikasikan Revisi Standar Pelayanan ini melalui website, media sosial dan dan media publikasi lainnya.

- b. Mengusulkan anggaran pembuatan bibit tanaman budaya langka dan tanaman khas keistimewaan melalui dana keistimewaan pada tahun 2025
- c. Berkoordinasi dan bersinergi dengan lintas sektoral (DPTH pusat) terkait dengan pengadaan bibit agar dapat menghidupi pengada pengedar di daerah agar melibatkan pengada pengedar swasta setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha di bidang kehutanan
- d. Peningkatan sinergitas antara BPTH, BBH dan pengada pengedar terkait dengan regulasi perundangan di bidang perbenihan tanaman hutan

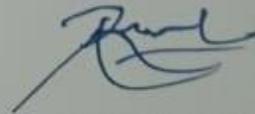
3. Kepala Sub Bag Tata Usaha (Kuncara, SP, M.Si) :

Komitmen dan kesepakatan bersama pada hari ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

4. Masukan dan saran dari peserta Forum Kebijakan Publik dengan tema Review Standar Pelayanan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Balai Perbenihan Kehutanan untuk segera ditindak lanjuti dengan Penetapan Standar Pelayanan.

Mengetahui:

KEPALA,



Ir. TRI BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP.196607131992031006

	Kehutanan diperpanjang	(istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB), Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB Menjadi : Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat jam 12.00 – 12.30 WIB), Jumat pukul 07.30 – 14.30 WIB (istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB.)	Perbenihan Kehutanan DIY tahun 2022 dengan penetapan SK Kepala Balai Perbenihan Kehutanan Nomor 188/01597 TAHUN 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Balai Perbenihan Kehutanan pada tanggal 16 Juni 2022 dan telah dipublikasikan di Web.	
3.	Pengada/pengedar berharap adanya kemudahan mekanisme dalam pengajuan sertifikasi mutu benih	Adanya komitmen dari Balai Perbenihan Kehutanan bahwa pada tahun 2022 ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dengan memfasilitasi pengajuan sertifikasi mutu benih dengan bekerja sama dengan BPDAS selaku pelaksana pengujian mutu benih.	Dilakukan kerjasama dengan BPDAS selaku pelaksana pengujian mutu benih bila ada pemohon yang mengajukan pengujian mutu benih.	Telah selesai ditindaklanjuti dengan bukti: 

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

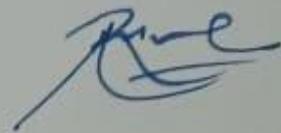
KEPALA,



Ir. TRI BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP.196607131992031006

								sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha di bidang kehutanan
								4. Peningkatan sinergitas antara BPTH, BBH dan pengada pengedar terkait dengan regulasi perundangan di bidang perbenihan tanaman hutan

KEPALA ,



Ir. TRI BASUKI SUNDORO, M.Sc
NIP. 196607131992031006

